

RADIKALISASI DEMOKRASI: CATATAN PENGANTAR

Agus Wahyudi

Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

Email: awahyudi@ugm.ac.id

Abstrak

Artikel ini bertujuan memperkenalkan sebuah cara berpikir, sebuah perspektif yang mungkin dapat membantu membaca kompleksitas dunia sosial di abad kita, dan untuk melakukan transformasi dan perubahan terhadap struktur-struktur sosial yang tidak adil. Kita perlu mengetahui di mana letak perspektif yang akan kita diskusikan dalam kategori ilmu pengetahuan secara umum, sebelum mendiskusikan secara agak rinci pengertian radikalisasi demokrasi dan mengapa gagasan ini layak kita bicarakan.

Kata kunci: radikalisasi, demokrasi, transformasi, perubahan.

Abstract

This article aims to introduce a way of thinking, a perspective, which is expected to be useful for our reading on the complexity of social world in our age, and further to encourage change and transformation of social structures which allow mediate social injustice. We need to understand position of the perspective we will be discussing within the general category of scientific knowledge, before we are able to discuss the notion of democracy radicalization in further detail and why we need to talk about this idea.

Keywords: radicalization, democracy, transformation, change.

PENDAHULUAN

Salah satu pembedaan konseptual yang mungkin dapat membantu menangani “kenyataan sosial” dari sudut ilmu pengetahuan adalah dengan melihatnya ke dalam dua bentuk kajian, yaitu: kajian deskriptif (*descriptive studies*), dan kajian normatif (*normative studies*) (Wolff, 2006: 2-3). Studi deskriptif mencoba mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana sesuatu itu (*how things are*). Sementara studi normatif mencoba menemukan bagaimana itu seharusnya (*how things should be*), apa yang tepat, adil dan benar secara moral. Ilmu-ilmu poli-

tik, sosiologi, sejarah merupakan contoh dari disiplin yang menangani studi deskriptif. Secara umum kita tahu bagaimana menemukan jawaban dari jenis pertanyaan deskriptif. Resepnya adalah datang dan lihatlah fakta-fakta atau fenomenanya, *go and look!*

Seperti yang akan kita lihat dalam diskusi-diskusi kita selanjutnya. Bukan berarti studi deskriptif ini tidak penting. Studi deskriptif ini tidak bisa dikatakan lebih mudah dibandingkan jenis non-deskriptif. Namun kita dapat membayangkan bahwa jawaban dari jenis studi deskriptif ini dapat disediakan dengan resep sederhana, yaitu datang dan melihat gejala atau fakta-faktanya. Persoalan kita sekarang adalah bagaimana menemukan jawaban untuk kajian atau studi normatif? Tidak ada jawaban yang mudah untuk menjawab pertanyaan ini. Namun seperti yang akan kita lihat, topik tentang radikalisme demokrasi melibatkan bentuk kajian normatif. Jadi perlu diingat bahwa pengetahuan dan wawasan aktual tentang demokrasi dan praktek-praktek menata atau mengorganisasi hidup bersama secara umum akan sangat membantu menerangi pokok masalah yang akan didiskusikan.

Radikalisme demokrasi menunjuk pada konsep demokrasi yang diterima dalam pengertian yang radikal dan plural. Pengertian ini memiliki makna yang khusus (spesifik), dan akan kita bahas dengan merujuk pada sejumlah pemikir post-Marxist seperti Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe. Mereka berharap bahwa karya-karya mereka tidak hanya dibaca sebagai "argumen teoritis" tetapi sebagai deskripsi dan diagnosis yang akurat atas politik sayap kiri kontemporer (Smith, 1998: 10). Untuk memahami radikalisme demokrasi dan menilai implikasi praktisnya di Indonesia, termasuk bagi usaha membantu gerakan kelompok-kelompok yang paling lemah dan tertindas yang umumnya dirasakan oleh kaum minoritas dalam masyarakat, penulis akan membagi tulisan ini ke dalam dua bagian. Bagian pertama mendiskusikan "justifikasi demokrasi" untuk menunjukkan nilai-nilai fundamental demokrasi dan mengindikasikan kemungkinan persoalannya. Kemudian bagian kedua mendiskusikan model-model demokrasi dan di mana letak atau posisi demokrasi radikal atau plural, serta tempat dan arah bagi usaha membela kaum minoritas yang terpinggirkan, lemah dan tertindas. Uraian akan diakhiri dengan sebuah catatan simpulan.

JUSTIFIKASI DEMOKRASI

Orang kadang mengatakan bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan yang paling dapat dibenarkan dibandingkan dengan sistem lain seperti tirani, aristokrasi atau monarki absolut. Namun ada petunjuk bahwa demokrasi adalah sistem yang sulit dipraktekkan dan merupakan sistem yang rumit. Kritik terhadap demokrasi sudah lama disampaikan, misalnya sejak akhir abad ke-4 atau awal abad ke-5 SM oleh pemikir politik seperti Plato. Plato menyebutkan demokrasi sebagai *a mob rule: the rule of rabble, the vulgar, the unwashed, the unfit*. Dia menggunakan *craft-analogy* untuk menunjukkan bahwa pemerintahan membutuhkan ahli atau keahlian, dan karena itu mengusulkan pendidikan untuk membentuk *guardian* untuk menyelenggarakan negara atau mengatur urusan publik. Sistem Plato pada hakikatnya adalah sistem kediktatoran. Kritik terhadap konsepsi Plato mengatakan bahwa tidak ada jaminan bahwa para *guardian* akan selalu dapat menahan godaan-godaan (Wolff, 2006: 2-3). Beberapa poin dari kritik Plato terhadap demokrasi masih terdengar gaungnya, bahkan hingga para penentang demokrasi pada awal abad ke-21 ini. Misalnya, kritik bahwa demokrasi tidak segera menghasilkan kesejahteraan atau hanya menciptakan hingar bingar politik. Namun, ada hal lain yang tak kalah menarik, misalnya, mengapa sistem politik demokrasi, yang tumbuh pertama kali di akhir abad ke-4 atau akhir abad ke-5 SM kemudian hilang di permukaan bumi selama 13 abad lebih serta sempat berkembang secara sporadik di sejumlah negara sejak abad ke-17, akhirnya berkembang pesat di abad ke-20 dan hingga sekarang ini? Pertanyaan ini telah didiskusikan Huntington pada 1991. Apakah di abad ke depan kita akan bisa memprediksi bahwa demokrasi akan surut dan digantikan sistem politik yang lain? Ini adalah contoh pertanyaan deskripsi yang umumnya digeluti oleh sarjana-sarjana ilmu politik.

Rujukan awal untuk setiap diskusi tentang demokrasi adalah praktek politik di Athena, Yunani Kuno, pada sekitar awal abad ke-5 SM. Model demokrasi pertama ini dikatakan tidak bisa disebut sebagai praktek demokrasi yang utuh. Dalam demokrasi langsung di negara kota Yunani di masa itu demokrasi hanya menjadi urusan elit laki-laki

yang pada umumnya dari lapisan kelas atas dan kaya. Kaum wanita tidak memiliki hak memilih dan demikian pula kaum budak dan para migran (yang bahkan hingga abad modern hak memilih kelompok terakhir ini juga masih problematik).

Salah satu kemungkinan yang membuat demokrasi sangat menarik adalah karena sistem ini memberikan kesempatan kepada setiap individu, misalnya melalui voting, untuk mengungkapkan apa keinginannya. Problem demokrasi dalam kaitannya dengan penciptaan kebaikan bersama (*common good*) selalu menarik dan penting didiskusikan. Proses pemilihan (voting atau pemilu) misalnya diterima bukan sekedar prosedur pengambilan keputusan, tetapi juga dan terutama menjadi sarana atau jalan bagi pengambilan keputusan tentang apa yang diharapkan atau diinginkan para individu sebagai rakyat atau warga negara. Dengan kata lain, motivasi atau dorongan setiap orang berbeda-beda dalam voting: orang dapat mengungkapkan kepentingan atau preferensinya yang saling bertentangan. Sejak abad ke-17 Condorcet secara matematis telah mendemonstrasikan bahwa jika sejumlah besar orang diberi informasi yang cukup untuk menentukan pilihan, mereka pada akhirnya akan dapat memilih atau menentukan pilihan yang tepat demi kebaikan bersama.

Para pembela demokrasi seringkali memberikan penjelasan tentang mengapa demokrasi merupakan sistem yang terbaik di antara sistem lain yang pernah dicoba dalam sejarah karena alasan-alasan instrumental itu. Misalnya, demokrasi berhubungan dengan indeks kesejahteraan hidup, bahwa negara-negara yang demokratis pada umumnya adalah negara yang makmur secara ekonomi (Stroup, 2010). Contoh yang lain adalah mereka yang menunjukkan bahwa demokrasi berhubungan dengan perdamaian seperti yang terungkap dalam "teori perdamaian demokratik." Teori ini menekankan pengertian bahwa perang atau konflik terjadi pada umumnya di antara negara-negara yang tidak demokratis atau antara negara (masyarakat) yang demokratis dan tidak demokratis; perang jarang atau tidak pernah terjadi di antara negara yang sama-sama demokratis (Reiter, 2012). Akan tetapi membela atau mengkritik demokrasi dari sudut pandang instrumental, termasuk cara Plato dan para pengikutnya mengkritik demokrasi

dengan menekankan pengertian akibat atau manfaat yang dihasilkan oleh demokrasi, adalah problematik dari sejumlah segi. Pendekatan ini melihat demokrasi hanya sebagai cara atau alat untuk mencapai sesuatu yang lain.

Demokrasi sebaliknya dapat dibela dengan cara yang berbeda, yaitu karena alasan instrinsik. Menurut alasan ini, ada sesuatu nilai-nilai dalam demokrasi itu sendiri yang sangat penting. Menurut sudut pandang ini, kita akan tetap memilih demokrasi bahkan ketika ternyata sistem demokratik kurang baik dibandingkan dengan sistem lain dalam mencapai atau menghasilkan kebaikan bersama (*the common good*). Sebagai contoh *benevolent absolutism* atau pemerintahan oleh despotik yang tercerahkan (*enlightened despot*) yang di atas kertas menjanjikan efektivitas yang lebih baik dalam menjalankan fungsi *delivery* atas bentuk-bentuk pelayanan sosial (*social services*), dan pemerintahan untuk rakyat melalui sistem ini bisa diterjemahkan atau dicapai dengan lebih baik dibandingkan demokrasi. Demokrasi adalah doktrin yang bukan saja menekankan pemerintahan untuk rakyat, tetapi juga dari rakyat dan oleh rakyat. Sebagaimana slogan demokrasi, *it is government for the people, by the people and of the people*. Dengan kata lain, demokrasi tidak dapat hanya dinilai dari keberhasilannya dalam mencapai *the common good*, meskipun hal ini tetap penting. Poinnya adalah demokrasi bernilai bukan karena demokrasi merupakan sistem pengambilan keputusan yang lebih baik dibandingkan dengan sistem lain, tetapi karena di dalam proses-proses demokrasi itu sendiri ada sesuatu yang sangat bernilai. Demokrasi pada umumnya mengekspresikan dua nilai yang dianggap sangat berharga: kebebasan (*freedom*) dan persamaan (*equality*) (Wolff, 2006: 77). Jika kebebasan setiap orang secara umum dapat diartikan sebagai kapasitas untuk pengembangan diri secara wajar tanpa hambatan, maka persamaan juga dapat dipahami sebagai hak yang sama untuk mencapai pengembangan diri (Smith, 1998: 20). Teori-teori politik dan praktek demokrasi dinilai berdasarkan keberhasilannya menerjemahkan dan merealisasikan dua nilai ideal yang saling bertentangan ini, dan yang akhirnya juga menjelaskan bahwa demokrasi dapat memiliki banyak model dan bentuk sistem politik (Liberal, 2004). selanjutnya kita akan memeriksa sejumlah model demokrasi dan men-

diskusikan letak demokrasi radikal dan plural di antara model-model demokrasi.

MODEL DEMOKRASI, DEMOKRASI RADIKAL DAN LGBT

Demokrasi radikal dan plural merupakan cara pandang dan proposal alternatif untuk menjawab kelemahan dari teori dan praktek demokrasi yang dominan. Mouffe memberikan penilaian kritis terhadap dua model yang selama ini dominan: model agregatif dan model deliberatif. Inti dari model agregatif adalah bahwa dengan perkembangan yang sangat pesat dari demokrasi massa, partisipasi populer dalam pengambilan keputusan seperti yang dikenali dalam teori demokrasi klasik di Yunani Kuno tidak lagi memadai. Pertama, model agregatif telah mendominasi wacana demokrasi dalam paruh kedua abad ke-20, seperti yang dapat dibaca dalam karya-karya Joseph Schumpeter, *Capitalism, Socialism and Democracy* (1947), dan Anthony Down, *An Economic Theory of Democracy* (1957). Keduanya telah mengeksplorasi pendekatan deskriptif pada demokrasi yang dapat dilawan dengan pendekatan normatif (Mouffe, 2000: 1). Model agregatif tidak mendorong gagasan partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan, karena model ini meyakini bahwa partisipasi rakyat hanya akan menyebabkan pengaruh disfungsional pada bekerjanya sistem demokrasi. Menurut model ini, memisahkan politik demokratis dari dimensi normatifnya menjadi sesuatu yang penting dan masalah-masalah demokrasi akan sepenuhnya terbatas dalam pengertiannya yang instrumental (Mouffe, 2000: 2).

Kedua, sebagai reaksi atas dominasi model agregatif yang mereduksi demokrasi semata-mata sebagai “prosedur untuk menangani pluralitas kelompok kepentingan” gelombang teori baru alternatif demokrasi muncul pada tahun 1970-an (Mouffe, 2000: 2). Gelombang baru teori politik normatif ini tercermin dalam karya-karya John Rawls dan Jurgen Habermas, yang kemudian dikembangkan oleh pengikutnya seperti Joshua Cohen (di sisi Rawls) dan Seyla Benhabib (di sisi Habermas). Mereka mendukung pengertian bahwa melalui prosedur deliberasi yang memadai akan tercapai bentuk-bentuk kesepakatan

yang memuaskan, baik rasionalitas (yang dipahami sebagai pembelaan atas hak-hak liberal), maupun legitimasi demokrasi (yang terwakili dalam kedaulatan rakyat) (Mouffe, 2000: 3). Di samping itu, dalam model Rawls dan model Habermas, pemisahan yang kuat dibuat antara yang “sekedar kesepakatan” dari “konsensus rasional,” dan bidang politik yang selayaknya diidentifikasi melalui pertukaran pendapat di antara orang-orang yang *reasonable* (dapat bernalar secara sehat) yang dibimbing oleh prinsip imparzialità (Mouffe, 2000: 4). Meskipun menunjukkan sejumlah kesamaan, teori demokrasi deliberatif Rawls dan Habermas dapat dibedakan dalam cara mereka menggambarkan bentuk-bentuk penalaran praktis (*practical reasons*) yang terwujud dalam institusi-institusi demokratik. Dengan kata lain, jika Rawls melihat bahwa keadilan merupakan masalah kunci, Habermas menganggap bahwa yang menjadi masalah kunci adalah legitimasi (Mouffe, 2000: 4, lihat juga Mouffe, 2000, *The Democratic Paradox*: 7). Dalam diskusi yang lebih elaboratif, Mouffe menunjukkan bahwa sementara model agregatif “melihat aktor-aktor politik selalu digerakkan oleh usaha mencapai kepentingannya,” model deliberatif “menekankan peranan penalaran dan pertimbangan moral” (Mouffe, 2013: 6; untuk diskusi kritis yang lain tentang deliberatif demokrasi lihat misalnya: Gutmann and Thompson (1996); Dreyzek, J.S. (2000; 2005); Deryzek, John.S. and Niemeyer, Simon (2006); untuk kritik terhadap model ini lihat Olson, J. (2009)).

Berbeda dengan model agregatif dan deliberatif, Mouffe melihat bahwa politik demokratik tidak bisa dilihat sebagai perkara menegosiasikan kompromi dan persetujuan di antara kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan, dan tujuannya juga bukan untuk mencapai konsensus rasional yang sepenuhnya inklusif tanpa ada eksklusi atau pengecualian. Bagi Mouffe, baik model agregatif maupun model deliberatif mengandung kelemahan serius karena “mengabaikan identitas kolektif dan peranan penting *affects* dalam konstitusinya” (Mouffe, 2013: 6). Meskipun melihat cacat serius dalam model demokrasi liberal, Laclau dan Mouffe berargumen tentang pentingnya mempertahankan inti pengertian dari demokrasi liberal.

“Tentu saja penting memahami bahwa demokrasi liberal bukan musuh yang harus dihancurkan dalam rangka menciptakan, lewat revolusi, masyarakat yang baru sama sekali. Inilah sebenarnya yang telah kita katakan dalam buku ini ketika kita mendesak keharusan mendefinisikan kembali proyek Kiri dalam pengertian “radikalisasi demokrasi”. Dalam pandangan kita, problem demokrasi liberal yang sekarang ini ada sebenarnya bukan tentang nilai-nilai pembentuknya yang terkristalisasi dalam prinsip-prinsip “kebebasan” dan “persamaan” bagi semua, melainkan dengan sistem kekuasaan yang mendefinisikan kembali dan membatasi bekerjanya nilai-nilai itu. Inilah sebabnya demokrasi radikal dan plural kita pahami sebagai tahap baru dalam pendalaman revolusi demokratik, sebagai perluasan perjuangan demokratik demi persamaan dan kebebasan bagi susunan hubungan-hubungan sosial yang lebih luas (Laclau and Chantal Mouffe, 2014: 1-7; Kindle Locations, tt.: 194-200).”

Mereka melihat bahwa demokrasi agregatif mengandung kelemahan serius karena tidak lengkap dalam melihat esensi politik. Politik tidak dapat dilihat secara sempit hanya sebagai urusan mendaftar kepentingan yang sudah tertanam, tetapi berperan penting dalam membentuk subjek politik. Di kesempatan lain, Laclau dan Mouffe menjelaskan, “Kita tidak pernah membayangkan proses radikalisasi demokrasi yang kita anjurkan sebagai berlangsung dalam bidang yang netral, yang tipologinya tidak mungkin terpengaruh, tetapi sebagai transformasi mendalam dari relasi-relasi kekuasaan yang ada (Kindle Locations: 188-189).

Proses demokrasi sering dilihat oleh banyak kalangan, termasuk mereka yang berada di sayap Kiri politik sebagai urusan kompetisi dan tarik-menarik berbagai kepentingan yang semuanya terjadi dalam ruang yang netral. Akibatnya banyak partai dan kekuatan politik sayap Kiri gagal menangkap struktur hubungan-hubungan kekuasaan, dan tidak dapat membayangkan kemungkinan untuk mengembangkan

hegemoni baru. Akibatnya, di banyak masyarakat demokrasi, hegemoni neoliberal dan kapitalisme dianggap sebagai satu-satunya alternatif bentuk kehidupan, dan terutama melalui globalisasi, pilihan kebijakan antara Kiri dan Kanan dianggap tidak lagi ada.

Cara membaca yang ditawarkan Laclau dan Mouffe sangat berbeda. Ruang publik (*public space*) tidaklah netral, dan juga tidak selalu rasional melainkan mengandung antagonisme yang tidak dapat dihapuskan, dan merupakan medan perebutan berbagai pengaruh atau kontestasi berbagai kelompok untuk mencapai hegemoni. Dalam *The Democratic Paradox*, Mouffe menyebut dimensi antagonisme yang tidak dapat dihapuskan ini sebagai yang “politik” (*the political*), dalam rangka membedakannya dari yang semata-mata ‘politics’ (*the politics*), yang menunjuk pada berbagai praktek tentang organisasi hidup bersama manusia (Mouffe, 2013). Mouffe mendefinisikan pengertian “yang politik” (*the political*) sebagai “dimensi antagonisme yang bersifat inheren dalam hubungan manusia, antagonisme yang dapat mengambil banyak bentuk dan muncul dalam berbagai jenis hubungan manusia”. Sementara kehidupan “politik” (*the politics*) menunjuk pada “rangkai-an praktek-praktek, wacana dan institusi-institusi yang mencoba membentuk ketertiban tertentu dan mengorganisasi hidup bersama manusia dalam kondisi yang secara potensial selalu konfliktual karena itu semua terpengaruh oleh dimensi “yang politik” (*the political*) itu” (Mouffe, 2000: 15).

Anna Marie Smith, dalam bukunya yang sangat mencerahkan tentang “Bayangan Demokrasi Radikal” (1998), menulis bahwa perspektif Laclau dan Mouffe merupakan revitalisasi perjuangan sosialisme melawan kapitalisme dan promosi perjuangan demokratik “gerakan sosial baru” perkotaan, lingkungan, anti-otoritarianisme, anti-kelembagaan, feminist, anti-rasis, minoritas seksual dan regional. Smith menunjukkan banyak ilustrasi yang sangat menarik mengenai proses *subordination* (penundukan) dan *oppression* (penindasan) yang terjadi di antara relasi pembangunan kapitalis, pembentukan identitas seksual dan politik regulasi seksual, dan membedakan relasi subordinasi dan opresi dengan pengertian yang sangat menarik.

“Relasi subordinasi dan relasi opresi sama-sama menunjuk pada ketundukan subjek pada kehendak orang lain. Bedanya adalah jika pada relasi subordinasi si subjek tidak menyadari bahwa orang yang mensubordinasi dirinya adalah orang yang menghalangi potensi realisasi dirinya secara penuh, pada relasi opresi si subjek mengetahui bahwa relasi subordinasi yang terjadi adalah relasi yang antagonistik karena si subjek percaya bahwa relasi yang terjadi akan menutup kemungkinan perkembangan identitasnya (Smith, 1998)”.

Bagaimana menghapuskan secara mendasar dua problem ini? Jelas, misalnya, bahwa homophobia di banyak negara dan masyarakat kita masih nampak sebagai struktur penindasan yang sangat kuat, dan kaum LGBT telah dan nampak akan selalu dihadapkan pada diskriminasi yang terbuka dan sering sangat telanjang baik dalam pekerjaan, dalam lingkungan perumahan, dan dalam pelayanan pemerintah tanpa adanya perlindungan dari negara (Smith, 1998: 29). AIDS secara keliru disamakan dengan “imoralitas” homoseksual dengan akibat selanjutnya yang sangat mengerikan, misalnya anak diambil paksa dari orangtua yang ditengarai homoseks, sementara warga LGBT dan mereka yang dicurigai LGBT menjadi sasaran penyingkiran, intimidasi, pelecehan, kekerasan dan bahkan pembunuhan brutal, sehingga keseluruhan sistem ganjaran dan hukuman homophobia sudah sangat eksensif (Smith, 1998: 29). Gambaran ini, meskipun akhir-akhir dalam beberapa tingkat telah mengalami sejumlah perubahan di sejumlah negara demokrasi Barat, nampaknya terus bertahan jika bukan malah lebih buruk di negara-negara miskin dan yang mengalami keterlambatan dalam proses demokratisasinya seperti Indonesia.

Jelas bahwa konsepsi tradisional demokrasi liberal tidak memadai untuk menjawab pertanyaan ini. Sama halnya adalah konsepsi demokrasi kaum sosialis yang berpusat pada kelas sosial yang menolak demokrasi anti-rasis, sexist, dan homophobia sebatas hanya “identitas politik” dan menganggap homophobia, misalnya, sebagai “isu lunak” (*soft issue*). Padahal, siapapun (setiap orang yang menjadi sasar-

an diskriminasi, pemisahan kerja, perlakuan upah yang tak adil, tak diberi hak memilih dalam pemilu, terkena polusi lingkungan, mendapatkan fitnah dari kelompok lain) menjadi korban dari sikap fanatik polisi, kriminalitas kebencian yang jahat. Semua pengalaman ini tak dapat dinamakan “isu lunak” atau khayalan, meskipun ini semua bukan penindasan yang berdasarkan kelas sosial. Semua bentuk subordinasi dan opresi itu adalah nyata dan merupakan pengalaman mengerikan bagi yang mengalaminya. Karena itu, inilah salah satu resep yang disarankan oleh demokrasi radikal dan plural. Salah satu ajaran utama dari *Hegemony and Socialist Strategy* adalah kebutuhan untuk menciptakan *a chain of equivalence* di antara berbagai perjuangan demokratik melawan bentuk-bentuk subordinasi yang berbeda-beda. Kita menyatakan bahwa perjuangan melawan sexism, rasisme, diskriminasi seksual, dan dalam membela lingkungan harus diartikulasikan bersama-sama para buruh dalam proyek hegemonik sayap Kiri baru. Diungkapkan dengan terminologi yang akhir-akhir ini nge-trend (*fashionable*), kita menekankan bahwa kelompok Kiri perlu mengatasi baik isu “redistribusi” dan isu “rekognisi”. Inilah yang kita maksudkan dengan “demokrasi radikal dan plural” (Laclau and Chantal Mouffe, 2014: 1-7; Kindle Locations, tt.: 253-258).

Radikalisasi demokrasi dapat dipahami sebagai proyek untuk mewujudkan demokrasi radikal dan plural dalam ruang ekonomi-politik dan kebudayaan. Catatan tambahan perlu diberikan dalam hubungan ini. Di satu pihak, kita dapat membayangkan bahaya dari penekanan pada identitas, dan tentang peranan identitas dalam menciptakan dan mengawetkan ketimpangan sosial yang tidak adil. Di pihak lain, Nancy Fraser mengidentifikasi bahaya “mis-rekognisi” yang ia sarankan dalam praktek biasanya berkaitan erat dengan (meskipun secara logis berbeda dari) distribusi sumber daya ekonomi dan politik yang timpang (tidak merata) (Kiss, 1999: 193-209). Sebagai bentuk ketidakadilan simbolik dan budaya, mis-rekognisi karena itu berakar pada pola-pola representasi, interpretasi dan komunikasi. “Tidak diakui” (*not to be recognized*) artinya orang bisa mengalami dominasi budaya, tak dihormati, dan tak dikenali dan itu berarti sangat terbuka

kesempatan baginya untuk mendapatkan perlakuan-perlakuan tidak manusiawi.

SIMPULAN

Pluralisme demokratik radikal sebagai gagasan nampaknya layak dipertimbangkan dilihat dari premis dan tujuannya. Arahnya adalah untuk melawan semua bentuk dominasi dan mencurigai setiap usaha normalisasi yang bertujuan mendisiplinkan. Sasarannya jelas adalah institusi-institusi ekonomi anti-demokrasi, aparat negara dan juga praktek dan struktur sosial, sementara juga bekerjasama dengan elemen-elemen demokratik yang terpencar-pencar dalam kehidupan sosial, menyambut dengan tangan terbuka bentuk-bentuk keragaman, aktivisme, inovasi dan perbedaan pendapat, dan di atas semuanya adalah mencoba memperdalam dan memperluas keunggulan kebebasan dan persamaan (Smith, 1998 : 34).

Membaca proyek radikalisasi demokrasi kita harus merefleksikan relevansinya di Indonesia. Salah satu pertanyaan yang masih terbuka dari segi praktek politik misalnya adalah identifikasi kelompok yang dapat terlibat atau dikategorikan sebagai bagian dari *a chain of equivalence*, sebelum akhirnya kita harus mendiskusikan strategi, pendekatan dan peralatan yang dapat dipertimbangkan untuk menjalankan proyek radikalisasi demokrasi secara lebih bermakna.

DAFTAR PUSTAKA

- Huntington, Samuel, 1991, *The Third Wave of Democratization*, University of Oklahoma Press, Oklahoma.
- Kiss, Elizabeth. 1999, "Democracy and the Politics of Recognition" dalam Ian Shapiro and Casiano Hacker-Cordon, *In Democracy's Edges*, Cambridge University Press: 193-209.
- Laclau, Ernesto and Chantal Mouffe, 2014, *Hegemony and Socialist Strategy: Towards A Radical Democratic Politics (Radical Thinkers)*, Kindle Edition, Verso Books, Kindle Locations 194-200.
- Liberal, 2004. "Democracy and the conflict between liberty and equality.", <http://www.politicsforum.org/forum/viewtopic.php?t>

=31103 diunduh 28 September 2004.

- Mouffe, C., 2000, *Deliberative Democracy or Agonistic Pluralism*, Center for the Study of Democracy, United Kingdom.
- _____, 2000, *The Democratic Paradox*, Verso Book, London and New York.
- _____, 2013, *Agonistic: Thinking the World Politically*, Kindle Ed., Verso Book.
- Smith, Anna Marie. 1998, *Laclau and Mouffe: The Radical Democratic Imaginary*, tt.
- Reiter, Dan. 2012, "Democratic Peace Theory", <http://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199756223/obo-9780199756223-0014.xml>, diunduh 25 Oktober 2012.
- Stroup, Michael D., 2010. "Economic Freedom, Democracy and the Quality of Life", <http://www.ncpa.org/pub/ba695>., diunduh 2, Maret 2010.
- Wolff, Jonathan. 2006, *An Introduction to Political Philosophy*, Revised Ed. Oxford University Press, Oxford.